

ANALISIS PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PEMATANGSIANTAR

Sutriani¹ dan Darwin Damanik^{2*}

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

Jl. Sisingamangaraja Barat, Bah Kapul, Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara - 21142

*Korespondensi Penulis: darwin.damanik@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization in Pematangsiantar City for the period 2006-2020. The method used in this study is quantitative. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) Pematangsiantar City. This study uses a simple linear analysis model. The variables used are economic growth (the dependent variable) and the degree of fiscal decentralization (the independent variable). The results show that the average degree of fiscal decentralization in Pematangsiantar City for 2006-2020 is still deficient at 8%. The degree of budgetary decentralization significantly affects economic growth and forecasting (trend) of economic growth in Pematangsiantar City for the period 2021-2020. 2025 has decreased every year.

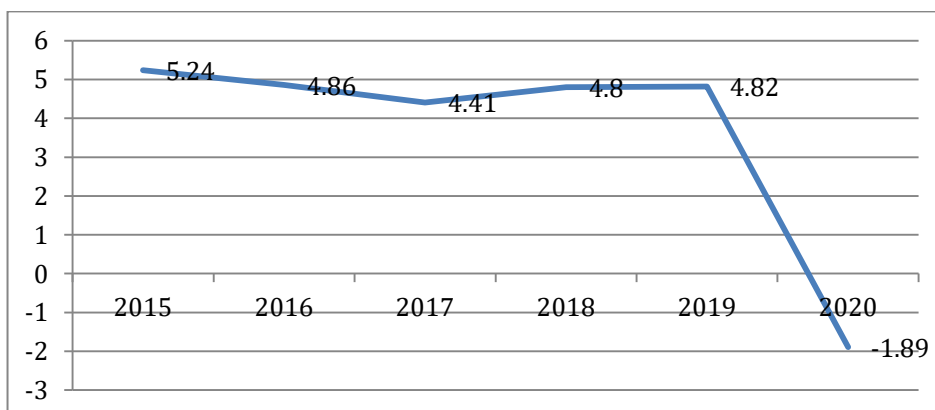
Keywords: Degree of Fiscal Decentralization; Economic growth; Trend

PENDAHULUAN

Untuk menjalankan roda perekonomian pemerintah membutuhkan modal yang diantaranya didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer yang diberikan dari pemerintah pusat. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan peran alokasi secara mandiri dalam menerapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah masing-masing.

Pertumbuhan ekonomi yang positif dan signifikan dapat menyimpulkan pembangunan disuatu daerah sangat bagus. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Pendapatan nasional juga merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara (Basmar, *et al*, 2021). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi pada skala regional dalam periode tertentu salah satunya adalah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kota Pematangsiantar adalah salah satu daerah otonom di Sumatera Utara yang letaknya strategis karena dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatra. Kota ini menjadi kota terbesar kedua setelah Medan. Kota ini sepanjang tahun 2015-2020 mengalami pertumbuhan ekonominya mengalami fluktuasi pada tingkat -1 – 6 persen, seperti yang terlihat pada gambar 1 dibawah ini :



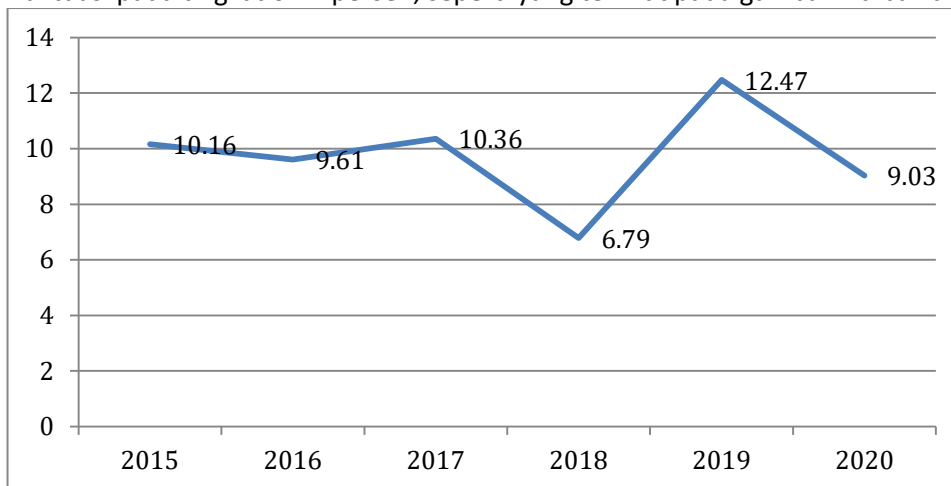
Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematangsiantar Tahun 2015-2020

Sumber: BPS Pematangsiantar Tahun 2015-2020 (data diolah)

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, kemampuan keuangan suatu daerah merupakan salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi. Pemerintah daerah diberikan kemampuan dan kewenangan untuk menggali setiap potensi daerahnya agar daerahnya memiliki sumber-sumber penerimaan daerahnya untuk membiayai pengeluaran pembiayaan pemerintah daerahnya (Muryawan *et al*, 2016).

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan adalah rasio desentralisasi fiskal. Pada derajat desentralisasi fiskal terdapat dua variabel yang dibandingkan yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah (TPD). Besar kecilnya PAD akan menentukan seberapa besar kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah (Pasaribu *et al*, 2021).

Derajat desentralisasi fiskal di Kota Pematangsiantar tahun 2015-2020 juga mengalami fluktuasi pada tingkat 6-12 persen, seperti yang terlihat pada gambar 2 dibawah ini :



Gambar 2. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Pematangsiantar

Sumber: BPS Pematangsiantar Tahun 2015-2020 (data diolah)

Sudah banyak diungkapkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu Alisman & Supriadi (2020), Lubis, *et al* (2017) yang menyatakan bahwa pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada juga penelitian Saputra *et al*, (2012), Astuti, *et al* (2018), Soleh, *et al* (2018) yang menunjukkan bahwa yang menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan peneliti adalah untuk melihat Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pematangsiantar.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2016), pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang.

Menurut Sukirno (2016), beberapa yang termasuk dalam teori-teori pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Teori Pertumbuhan Klasik, menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi yang terutama diperhatikan ahli ekonomi klasik adalah tenaga kerja.
2. Teori Schumpeter, menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
3. Teori Harrod-Domar, menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan

pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan.

4. Teori Neo-Klasik, teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi (Rahayu, *et al* , 2016), yaitu:

1. Faktor Sumber Daya Alam (SDA)
2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
4. Faktor Budaya
5. Sumber Daya Modal

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

a. Desentralisasi Fiskal

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahajeng, 2016).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kharisma (2013) ada empat jenis desentralisasi, yaitu :

1) Desentralisasi Politik (*political decentralization*)

Desentralisasi politik bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan secara politis. Hal ini menyiratkan bahwa otoritas lokal yang dipilih harus bertanggung jawab terhadap masyarakat lokal yang telah memilihnya dan mereka harus lebih baik mempresentasikan kepentingan lokal dalam pengambilan keputusan politis.

2) Desentralisasi Administrasi (*administrative decentralization*)

Desentralisasi administrasi yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu.

3) Desentralisasi Ekonomi (*economic or market decentralization*)

Desentralisasi Ekonomi merujuk pada transfer fungsi pemerintah kepada sektor swasta. Artinya, penugasan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah diserahkan kepada perusahaan swasta, kepentingan kelompok, organisasi yang suka rela dan organisasi bukan pemerintah lainnya.

4) Desentralisasi Fiskal (*fiscal decentralization*)

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi, di mana apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa subsidi/bantuan maupun pinjaman dari pemerintah pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai.

Ada tiga bentuk variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah (Alisman & Supriadi, 2020) yaitu :

- 1) Desentralisasi, yaitu pemberian pelimpahan wewenang tanggung jawab ke instansi vertikal di daerah atau pemerintah daerah.
- 2) Devolusi, yaitu pelimpahan yang berhubungan dengan suatu instansi yang bukan hanya implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah.

- 3) Delegasi, yaitu daerah dapat bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan situasi tertentu atas nama pemerintah pusat.

Menurut Suparmoko (2016), tujuan kebijakan desentralisasi adalah :

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat.
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Beberapa Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Daerah, yaitu :

- a. Secara nasional (agregat), transfer per kapita yang meningkat sangat tajam dari tahun ke tahun selaras dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran.
- b. Pada beberapa daerah yang tingkat transfer per kapita nya sangat tinggi ternyata mengalami penurunan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.
- c. Desentralisasi fiskal telah secara nyata memberikan dampak ketertinggalan (*catching-up*) bagi daerah-daerah yang sebelumnya yang tertinggal untuk mengejar ketertinggalan nya.
- d. Telah terjadi peningkatan output layanan publik didaerah, seperti pendidikan dan kesehatan.

b. Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Sistiana & Makmur (2014), derajat desentralisasi fiskal merupakan kemampuan daerah dalam kemandirian fiskal. Suatu daerah dikatakan layak menjadi daerah otonom bila salah satu syaratnya memiliki kemampuan pembiayaan yang berasal dari potensi yang dimilikinya sendiri.

Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerimaan, yaitu perbandingan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah (Marlina, 2014), dengan rumus:

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Dimana:

- DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah tahun t
- TPD = Total Penerimaan Daerah tahun t

Selanjutnya,rasio ini dapat dijelaskan dengan melihat skala interval yang ditemukan oleh tim KKPEE UGM (Hanafi dan Mugroho, 2009) dalam jurnal Sistiana & Makmur (2014) , yaitu :

Tabel 1. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

DDF (%)	Keterangan
0,00 - 10,00 %	Sangat Kurang
10,01 – 20,00 %	Kurang
20,01 – 30,00 %	Sedang
30,01 – 40,00 %	Cukup
40,01 – 50,00 %	Baik
>50,00 %	Sangat Baik

METODE PENELITIAN

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder ini merupakan data *time series*(data berkala) dalam jangka waktu 2006-2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematangsiantar. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 1) Data Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pematangsiantar, dan 2) Data APBD di Kota Pematangsiantar.

Metode yang digunakan pada pengumpulan data penelitian ini melalui dokumentasi. Teknik analisis data adalah :

Untuk melihat Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal di Kota Pematangsiantar

Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerimaan, yaitu perbandingan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah (Marlina, 2014:54), dengan rumus:

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

dimana:

- DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah tahun t
- TPD = Total Penerimaan Daerah tahun t

Untuk memperkirakan Peramalan (trend) Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pematangsiantar

Analisis trend merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu peramalan atau estimasi pada masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam analisis runtun waktu (*time series*) hal yang paling menentukan adalah kualitas dan keakuratan dari data-data yang diperoleh, serta waktu atau periode dari data-data yang dikumpulkan. Metode yang digunakan dalam analisis runtun waktu (*time series*) dengan metode kuadrat terkecil (*Least Square Method*). Persamaan garis linier dari analisis time series akan mengikuti:

$$Y = a + bX$$

dimana:

- Y = Variabel dependen
- X = Variabel independen dengan menggunakan waktu (biasa dalam tahun)
- a = Konstanta
- b = Parameter

Untuk mencari nilai a dan b dapat dipakai persamaan:

$$a = \frac{\sum Y}{N}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

dimana:

- \sum = total
- N = banyaknya sampel

Untuk Menghitung Pengaruh persamaan regresi menggunakan Regresi Linier sederhana melalui Ordinary Least Squares (OLS)

Regresi linier sederhana bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linier.

$$Y = a + \beta X + e$$

dimana:

- Y = pertumbuhan ekonomi (dalam %)
- a = nilai konstan (*intercept*)
- β = koefisien regresi (*slope*)
- X = Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %)
- e = *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Data

Penelitian ini untuk melihat Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pematangsiantar. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data

Time Series yaitu dalam rentang waktu mulai dari tahun 2006-2020. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*Software*) komputer Eviews 11 dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana.

1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pembahasan ini akan diperhatikan berapa besar pertumbuhan ekonomi di kota Pematangsiantar dari tahun 2006-2020, dimana data yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Perkembangan PDRB untuk kota Pematangsiantar selama tahun 2006-2020 terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB di kota Pematangsiantar secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematangsiantar

No	Tahun	PDRB(Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
1	2006	1.649.967,57	5,77
2	2007	1.645.113,60	5,96
3	2008	1.729.273,45	5,12
4	2009	1.828.251,13	5,72
5	2010	5.929.877,90	7,20
6	2011	6.333.306,10	6,80
7	2012	6.753.561,30	6,64
8	2013	7.141.859,50	6,34
9	2014	7.594.428,82	6,34
10	2015	7.992.371,11	5,24
11	2016	8.380.773,30	4,86
12	2017	8.750.152,85	4,41
13	2018	9.170.185,70	4,80
14	2019	9.611.738,78	4,82
15	2020	9.430.039,35	-1,89
	Rata-rata	6.262.726,70	5,21

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar Tahun 2006-2020 (data diolah)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kota Pematangsiantar selama periode Tahun 2006-2020 adalah sebesar 5,21 %. Angka pertumbuhan ini relatif bervariasi. Angka pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Tahun 2011 sebesar 6,80 %. Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -1,89 %.

1.2 Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Dari tabel 2 diketahui bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Kota Pematangsiantar selama periode Tahun 2006-2020 yaitu sebesar 8,00 %, yang berarti bahwa anggaran pendapatan di Kota Pematangsiantar selama tahun penelitian dapat dikatakan sangat kurang karena berada sangat jauh dibawah skala 20%.

DDF sangat bervariasi jumlahnya karena tidak stabil (naik turun). DDF tertinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu 12,47% dan terendah terjadi pada Tahun 2008 yaitu 5,00%.

Tabel 3. DDF Kota Pematangsiantar Tahun 2006-2020

No	Tahun	PAD (Juta Rp)	TPD	DDF (%)	Keterangan
1	2006	12.415.382,88	211.840.405,74	5,86	Sangat Kurang
2	2007	16.207.939,76	318.426.730,69	5,09	Sangat Kurang
3	2008	18.789.656,99	379.287.655,62	5,00	Sangat Kurang
4	2009	23.012.104,49	451.147.655,77	5,11	Sangat Kurang

5	2010	25.910.942,91	482.359.552,72	5,37	Sangat Kurang
6	2011	44.792.749,49	565.383.738,39	7,92	Sangat Kurang
7	2012	49.915.365,99	668.838.605,53	7,46	Sangat Kurang
8	2013	61.357.963,45	731.041.119,47	8,39	Sangat Kurang
9	2014	90.477.498,19	831.765.871,21	10,89	Kurang
10	2015	95.557.865,28	940.139.328,40	10,16	Kurang
11	2016	101.581.324,16	1.082.763.883,42	9,61	Sangat Kurang
12	2017	105.445.993,20	1.018.245.314,43	10,36	Kurang
13	2018	137.052.839,19	2.017.670.121,28	6,79	Sangat Kurang
14	2019	125.341.747,50	1.005.302.117,11	12,47	Kurang
15	2020	80.901.931,90	895.901.102,12	9,03	Sangat Kurang
	Rata-rata	65.917.420,36	773.340.880,12	8,00	Sangat Kurang

Sumber: BPS Pematangsiantar Dalam Angka Tahun 2006-2020 (data diolah)

1.3 Perkiraan (trend) Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pematangsiantar

Analisis trend merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu peramalan atau estimasi pada masa yang akan datang. Berikut ini merupakan tabel perhitungan trend dapat dilihat pada tabel 4.6:

Tabel 4. Perhitungan Trend

Tahun	Y	X	X*Y	X^2
2006	5,77	-7	-40,39	49
2007	5,96	-6	-35,76	36
2008	5,12	-5	-25,6	25
2009	5,72	-4	-22,88	16
2010	7,2	-3	-21,6	9
2011	6,8	-2	-13,6	4
2012	6,64	-1	-6,64	1
2013	6,34	0	0	0
2014	6,34	1	6,34	1
2015	5,24	2	10,48	4
2016	4,86	3	14,58	9
2017	4,41	4	17,64	16
2018	4,8	5	24	25
2019	4,82	6	28,92	36
2020	-1,89	7	-13,23	49
Σ	78,13		-77,74	280

Dari tabel diatas, maka dapat dicari nilai a dan b menggunakan rumus berikut ini :

$$a = \frac{\sum Y}{N} = \frac{78,13}{15} = 5,29$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-77,74}{280} = -0,28$$

Dari perhitungan diatas, diketahui a = 5,29 , dan b = -0,28. Maka untuk mengetahui nilai trend dapat dilihat perhitungan berikut ini :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 5,29 - 0,28 X$$

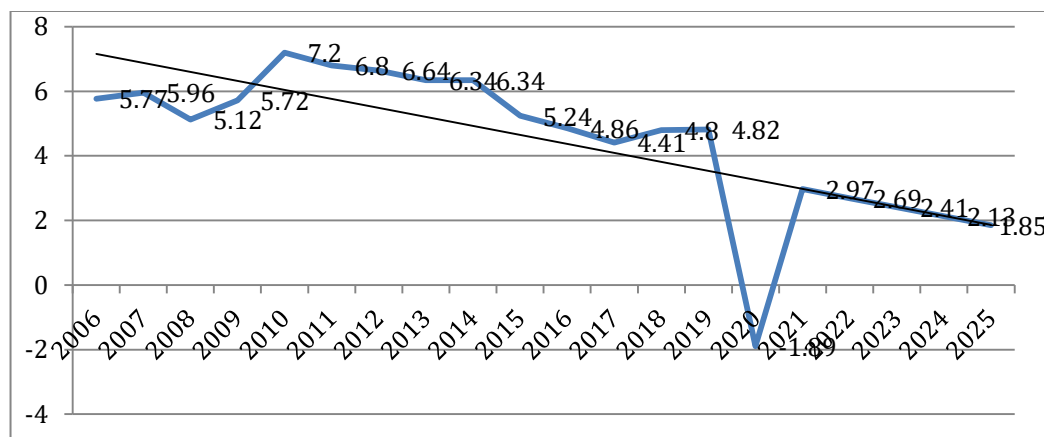
Dari hasil perhitungan trend diatas, dapat diketahui trend pada tahun 2021-2025 sebagai berikut :

Tabel 5. Perkiraan (trend) Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Pematangsiantar

Tahun	Trend
2021	2,97
2022	2,69
2023	2,41
2024	2,13
2025	1,85

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi di kota Pematangsiantar periode tahun 2021-2025 mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Berikut ini adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2006-2021 yang dapat dilihat gambar 1 yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di kota Pematangsiantar.



Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pematangsiantar

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi kota pematangsiantar tahun 2006-2025 (data di olah)

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dikota pematangsiantar tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 7,2%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -1,89%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dikota pematangsiantar bernilai negatif karena pandemi covid-19. Sedangkan perkiraan trend pada tahun 2021-2025 juga pertumbuhan ekonomi dikota pematangsiantar mengalami penurunan setiap tahunnya, tetapi sudah bernilai positif.

2. Pengujian Asumsi Klasik

2.1 Uji Autokorelasi

Autokorelasi dalam konsep regresi linier berarti komponen error atau residual berdasarkan urutan waktu (*time series*). Untuk mendapatkan hasil yang baik, seharusnya model terbebas dari autokorelasi yang diketahui melalui Uji *Breusch-Godfrey (LM Test)*, dimana jika nilai prob < 0,05 maka terjadi gejala autokorelasi, sedangkan jika nilai prob > 0,05 maka tidak terjadi gejala autokorelasi.

Tabel 6. Uji Autokorelasi Menggunakan *LM Test*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.516101	Prob. F(2,11)	0.6106
Obs*R-squared	1.286799	Prob. Chi-Square(2)	0.5255

Sumber: Eviews 11

Dari hasil uji autokorelasi diatas dengan menggunakan *LM Test* dapat diketahui bahwa prob $0,53 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian.

2.2 Uji Heterkedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan *variance* dan *residual* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Syarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai prob $< 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai prob $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas Menggunakan *White Test*

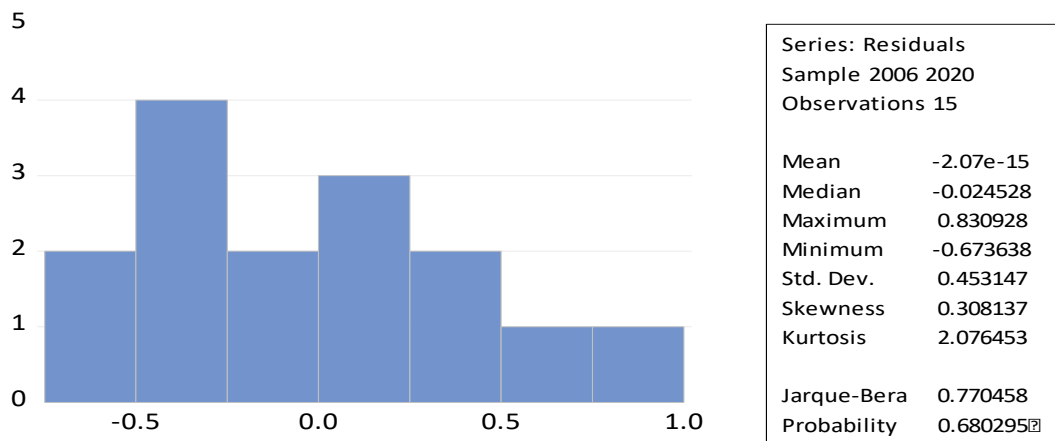
Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	2.736581	Prob. F(2,12)	0.1049
Obs*R-squared	4.698488	Prob. Chi-Square(2)	0.0954
Scaled explained SS	1.899447	Prob. Chi-Square(2)	0.3868

Sumber: Eviews 11

Dari tabel diatas diketahui bahwa prob adalah $0,10 > 0,05$, artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

2.3 Uji Heterkedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Suatu model yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Cara melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan pendekatan analisis grafik *Normal Probability Plot*. Pada pendekatan ini residual terdistribusi secara normal apabila garis (titik-titik) yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonal nya.



Gambar 4. Uji Normalitas Menggunakan Normal Probability Plot
Sumber: Eviews 11

Dari hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai *probability* sebesar 0,68 > 0,05, artinya residual data penelitian terdistribusi secara normal.

3. Regresi Linear Sederhana

Tabel 8. Analisis Regresi Linier Sederhana

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi
 Method: Least Squares
 Date: 07/22/21 Time: 20:52
 Sample: 2006 2020
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.66267	0.432569	31.58492	0.0000
DDF	0.226490	0.052110	4.346369	0.0008
R-squared	0.592360	Mean dependent var		15.46719
Adjusted R-squared	0.561004	S.D. dependent var		0.709742
S.E. of regression	0.470253	Akaike info criterion		1.452472
Sum squared resid	2.874787	Schwarz criterion		1.546879
Log likelihood	-8.893541	Hannan-Quinn criter.		1.451467
F-statistic	18.89092	Durbin-Watson stat		1.666837
Prob(F-statistic)	0.000792			

Sumber: Eviews 11

$$Y = a + \beta X + e$$

$$Y = 13.66267 + 0.226490 X_1 + e$$

Persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel X (Derajat Desentralisasi Fiskal) berpengaruh positif terhadap variabel Y (Pertumbuhan Ekonomi).

Dari regresi di atas maka dapat di interpretasikan hasil penelitian:

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 13.66267, artinya jika variabel DDF bernilai 0% maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 13.66267%.
2. Nilai koefisien DDF sebesar 0.226490, artinya jika DDF meningkat 1% maka diharapkan Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 0.226490% dengan asumsi variabel lain tetap.

4. Uji Hipotesis

4.1 Uji Parsial (Uji t)

Dari hasil analisis regresi pada tabel 4 diketahui bahwa t-statistic DDF sebesar 4.346369 dengan Prob sebesar 0,0008 dimana $< 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya DDF berpengaruh parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Uji t	C	13.66267	0.432569	31.58492	0.0000
	DDF	0.226490	0.052110	4.346369	0.0008
R Square (R ²)		Adjusted R Square (Adj. R ²)			
Koefisien Determinasi	0.592360	0.561004			

Sumber: Eviews 11 (data diolah)

4.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama-sama dan memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Dalam menghitung nilai koefisien determinasi diukur dengan menggunakan *R-squared*.

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai variabel *R-squared* pada tabel regresi linier sederhana menunjukkan bahwa besarnya yaitu 0.5924, menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel DDF terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 59,24%. Artinya DDF terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh sebesar 59,24%, sedangkan sisanya 40,76% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi.

5. Pembahasan

5.1 Derajat Desentralisasi Fiskal di Kota Pematangsiantar

Derajat desentralisasi fiskal merupakan tingkat kemampuan daerah dalam kemandirian fiskal. Suatu daerah dikatakan layak menjadi daerah otonom bila salah satu syaratnya memiliki kemampuan pembiayaan yang berasal dari potensi yang dimilikinya sendiri.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Kota Pematangsiantar selama periode Tahun 2006-2020 yaitu sebesar 8,00 %, yang berarti bahwa anggaran pendapatan di Kota Pematangsiantar selama tahun penelitian dapat dikatakan sangat kurang karena berada sangat jauh dibawah skala 20%. DDF tertinggi di kota Pematangsiantar yaitu pada tahun 2019 sebesar 12,47%. Sedangkan DDF terendah di kota Pematangsiantar yaitu pada tahun 2008 sebesar 5,00%. Dari skala interval derajat desentralisasi fiskal, daerah otonom harus memiliki tingkat derajat desentralisasi fiskal minimal 20%. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi fiskal di kota Pematangsiantar dalam kurun waktu 15 tahun yaitu tahun 2006-2020 hanya 8%.

Hasil penelitian yang sama yaitu Enceng, *et al* (2012) yang menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal di kabupaten Purworejo masih sangat rendah. Yang diukur dengan menggunakan tingkat DDF dari rasio PAD terhadap TPD rata-rata sebesar 7,99% selama 3 tahun (2008-2010). Sama juga dengan hasil penelitian Sistiana & Makmur (2014) yang menunjukkan bahwa DDF kabupaten/kota di Jawa timur tahun 2006-2010 termasuk kategori sangat rendah dengan rata-rata persentase DDF sebesar 8%. Sama juga dengan penelitian Al-Aksari (2017) yang menunjukkan bahwa nilai DDF di Kabupaten Bungo periode 2003-2013 termasuk kategori sangat rendah yaitu dengan rata-rata persentase DDF sebesar 8,6%. Penelitian Soleh, *et al* (2018) yang menunjukkan bahwa nilai DDF di Kota Jambi termasuk kategori kurang yaitu dengan rata-rata persentase DDF sebesar 12,11%.

5.2 Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pematangsiantar

Dari hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa H1 diterima H0 ditolak, artinya DDF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pematangsiantar.

Apabila semakin tinggi desentralisasi fiskal, maka semakin rendah pertumbuhannya, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD yang akan diterima dan membandingkannya dengan total pendapatan daerah sebagai gambaran dari derajat desentralisasi fiskal.

Artinya peranan PAD kota Pematangsiantar terhadap pendapatan daerah masih rendah sehingga kota Pematangsiantar dikatakan belum mandiri secara fiskal. Dengan rendahnya PAD maka daerah dihadapkan pada permasalahan yang rumit dan dikatakan belum berhasil dalam pelaksanaan otonomi daerah. DDF salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan, karena DDF menggambarkan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Namun, harus diakui DDF di kota Pematangsiantar masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran daerahnya secara mandiri. Karena itu otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai keuangan yang efektif.

Hasil penelitian Faridi (2011), Alisman & Supriadi (2020) menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam penelitian Soleh, *et al* (2018), Astuti, *et al* (2018) menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.3 Trend Pertumbuhan Ekonomi di kota Pematangsiantar

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus yang ada, diketahui bahwa trend pertumbuhan ekonomi di kota Pematangsiantar terjadi kenaikan setiap tahunnya selama 5 tahun yaitu tahun 2021-2025.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di Kota Pematangsiantar masih sangat jauh dari skala 20%, yaitu hanya 8,00% artinya masih tergolong sangat kurang.
2. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pematangsiantar. Nilai koefisien DDF sebesar 0.097838, artinya jika DDF meningkat maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 0.097838 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan bahwa nilai variabel *R-squared* pada tabel regresi linier sederhana menunjukkan bahwa besarnya yaitu 0.5934, menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel DDF terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 59,34%. Artinya DDF terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh sebesar 59,34%, sedangkan sisanya 40,66% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi.
4. Perkiraan (trend) Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Pematangsiantar dalam 5 Tahun kedepan yaitu tahun 2021-2025 mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Saran

1. Pemerintah kota Pematangsiantar seharusnya melakukan upaya yang intensif untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah agar derajat desentralisasi fiskal semakin meningkat. Dengan cara melakukan uji coba pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR) dan uji coba pembayaran retribusi parkir dengan menggunakan aplikasi Qren (pembayaran non tunai berbasis *Quick Response* atau QR) agar tidak terjadi pembodongan parkir.
2. Pemerintah kota Pematangsiantar perlu menetapkan kebijakan pembangunan dengan prioritas produk unggulan, dan sektor unggulan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari tingkat penerimaan PDRB kota Pematangsiantar. Pemerintah kota Pematangsiantar perlu menetapkan kebijakan

pembangunan dengan prioritas produk unggulan dengan mengingat sektor jasa memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor-sektor lainnya. Dengan cara melengkapi sarana dan prasarana, mendukung jalannya kurikulum atau proses belajar mengajar, menambah tenaga didik yang berpengalaman, dan melakukan berbagai kegiatan pendidikan lainnya untuk menciptakan kualitas pendidikan yang baik dikota Pematangsiantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman, dan Dedi Supriadi. 2020. *Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019*. EMT, Vol 4, No 2.
- Apriesa, Lintangia Fajar, dan Miyasto. 2013. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Diponegoro Journal of Economics, Vol 2, No 1.
- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah, Konsep dan penatalaksanaan di Indonesia, Edisi Pertama*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Basmar, Edwin, et al. 2021. *Perekonomian & Bisnis Indonesia*. Makassar: Yayasan Kita Menulis.
- Damanik, Darwin, et al. 2021. *The Effect Of Population And Human Development Index On economic Growth Pematangsiantar City*. BIIRCI-Journal, Vol 4, No 3.
- Gultom, Miswati, et al. 2020. *Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah DI Kota Pematangsiantar*. EKUILNOMI, Vol.2, No.1
- Kharisma, Bayu. 2013. *Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. JEL, Vol.14, No.2.
- Marlina. 2014. *Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal, Elastisitas, Efisiensi, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Aceh*. JSEB, Vol.1, No.1.
- Muryawan, Sang Made, dan Made Sukarsa. 2016. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*. E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol 5, No 2.
- Pasaribu, Esti, et al. 2021. *Analisis Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal*. AKUNTABILITAS, Vol 15, No 1.
- Purba, Elidawaty, et al. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi*. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis.
- Rahajeng, Anggi. 2016. *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahayu, Sri Endang, et al. 2016. *Pengantar Ekonomi Makro*. Medan: PERDANA PUBLISHING.
- Sistiana, Mega, dan M. Hadi Makmur. 2014. *Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten/Kota*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 12, No 4.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Suparmoko, M. 2016. *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, Edisi Pertama*. Yogyakarta: ANDI.
- Sukirno, Sadono. 2016. *Teori Pengantar Makro Ekonomi, Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.